

**TINGKAT PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2013**

Yuliantika¹, Nurharmi¹, Hendrizal¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta
E_mail: yuliantika792@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat saat pemungutan suara, seperti: memilih karena diberi uang atau memilih karena kesadaran politik masyarakat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih subjek dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013. 2) Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih partisipan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013. 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masuk kategori pemilih subjek dan pemilih partisipan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Instrumen yang digunakan adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang bila dilihat dari pengetahuan tentang visi dan misi pasangan calon, keterlibatan dalam diskusi politik, mengenal pasangan calon, memilih dengan hati nurani, tidak adanya tekanan, kepercayaan terhadap pasangan calon, bisa dikatakan bahwa masyarakat Kota Padang secara umum terkategori dalam pemilih partisipan. Dengan bekal pengetahuan politik yang dimiliki, masyarakat sudah cerdas dalam memilih. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi kesadaran politiknya.

Kata Kunci: Partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Kota Padang

I. PENDAHULUAN

Sesuai dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis.” artinya demokrasi tidak hanya pada level penyelenggaraan pemerintahan pusat, tetapi juga diterapkan pada tingkat pemerintahan daerah seperti pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”

Hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah partisipasi politik masyarakat. Hal ini karena tanpa adanya partisipasi

politik, sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya. Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik.

Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri khas modernisasi politik. Menurut Huntington dan Nelson (1990:5), “Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik”. Partisipasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat pada saat pemungutan suara.

Jika berbicara tentang partisipasi politik, khususnya sikap masyarakat saat pemungutan suara akan didapati adanya permasalahan-permasalahan, yaitu: Pertama, banyaknya masyarakat memilih karena diberi uang atau diiming-imingkan hadiah, masyarakat berpikir mumpung pemilihan kepala daerah, toh kalau

sudah terpilih, akan lupa kepada pemilihnya. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah. Kedua, sedikitnya masyarakat yang memilih karena kesadaran politiknya sudah tinggi. Mereka yang memilih adalah mereka yang melihat dari visi dan misi dari para kandidat. Ketiga, adanya faktor yang membuat masyarakat memilih karena uang dan kenapa mereka memilih karena visi dan misi para kandidat. Keempat, masih kurangnya pendidikan politik masyarakat. Kelima, kesadaran politik masyarakat belum maksimal. Memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan peranan pemerintah, baik pemerintah Kota Padang maupun terlebih pemerintah kecamatan, untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sikap memilih masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Djunardi selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang pada hari Selasa

tanggal 7 Januari 2014 pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang dalam pemilihan kepala daerah pada putaran pertama masih tergolong rendah yaitu hanya 57.66% sedangkan target yang diharapkan yaitu 75%. Salah satu penyebab masyarakat tidak ikut dalam pemilihan adalah letak TPS yang jauh dari rumah. KPU juga tidak menyediakan TPS khusus untuk pedagang-pedagang yang ada di pasar serta di rumah sakit.

Realitas dan fenomena rendahnya partisipasi politik ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan, kerana hak politik merupakan salah satu hak asasi manusia. Namun masyarakat yang telah diberi hak pilihnya tersebut justru tidak mau menggunakan hak pilihnya.

Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2013.”

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melihat bagaimana sikap masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013, dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih subjek dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013?
2. Bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih partisipan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masuk kategori pemilih subjek dan pemilih partisipan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013?

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih subjek dalam pemilihan

kepala daerah Kota Padang tahun 2013.

2. Mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih partisipan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masuk kategori pemilih subjek dan pemilih partisipan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Menurut Zuriyah (2007:47) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang memilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013 yaitu 323.594 orang. Mengingat jumlah

populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan peneliti maka penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasi. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel “*Cluster Sampling* yaitu “menentukan sampel apabila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas.” (Sugiyono 2012:120), maka sampel yang diambil adalah dengan mengambil dua kelurahan dari Kecamatan Koto Tangah, yaitu Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Padang Sarai.

Berdasarkan perhitungan tabel Isaac dan Michael dengan taraf kesalahan 10%, sampel yang dapat mewakili populasi sebanyak 300.000 adalah 30.000. Dan jumlah penentuan sampel menurut Sugiyono (2012:128) bahwa, “Populasi 30.000 dengan taraf kesalahan 10% adalah 268 sampel”.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber atau

informan melalui tanya jawab lisan. Wawancara ditujukan kepada anggota KPU Kota Padang dan masyarakat.

2. Angket (*Kuesioner*)

Yaitu pengumpulan data dengan memberikan angket sebanyak 268 responden kepada masyarakat Kota Padang yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang berupa catatan literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013, yang dibatasi pada sikap saat pemungutan suara. Hasil angket partisipasi politik masyarakat yang

terkategori pemilih subjek di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Padang Sarai sebagai berikut:

1. Memilih karena diberi uang atau diiming-imingkan hadiah

Tabel 09: Persentase Pemilih Karena Diberi Uang atau Diiming-imingkan Hadiah

No.	Kelurahan	Ya	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	42	31,3%
2	Padang Sarai	45	33,6%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 09 di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih karena diberi uang atau diiming-imingkan hadiah untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “ya” sebanyak 31,3% dan sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “ya” sebanyak 33,6%.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat bernama Badu (nama samaran) bahwa “Pada saat pemilihan kepala daerah

Kota Padang tahun 2013, ia mendapatkan amplop yang berisi uang 50.000 dan hadiah berupa baju kemeja dari pasangan calon yang dipilihnya. Uang dan hadiah tersebut didapat pada saat kampanye.”

Selanjutnya dengan Budi (nama samaran) bahwa “Pada saat hari pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013 tepatnya pada hari pencoblosan, paginya ada orang datang ke rumahnya dan mengasih uang 100.000 untuk memilih pasangan yang disuruh orang tersebut.”

2. Mengetahui visi dan misi pasangan calon

Tabel 10: Persentase Pemilih tidak Mengetahui Visi dan Misi Pasangan Calon

No.	Kelurahan	Tidak	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	42	31,3%
2	Padang Sarai	38	28,4%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang mengetahui visi dan misi pasangan

calon untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “tidak” sebanyak 31,3% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “tidak” sebanyak 28,4%.

3. Terlibat dalam diskusi politik yang diadakan oleh pasangan calon

Tabel 11: Persentase Pemilih tidak Terlibat dalam Diskusi Politik yang Diadakan oleh Pasangan Calon

No.	Kelurahan	Tidak	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	90	67,2%
2	Padang Sarai	94	70,1%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 11 di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam diskusi politik yang diadakan oleh pasangan calon untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “tidak” sebanyak 67,2% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “tidak” sebanyak 70,1%.

4. Mengenal pasangan calon yang dipilih

Tabel 12: Persentase Pemilih tidak Mengenal Pasangan Calon yang Dipilih

No.	Kelurahan	Tidak	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	36	26,9%
2	Padang Sarai	32	23,9%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 12 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat yang mengenal pasangan calon yang dipilih untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “tidak” sebanyak 26,9% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “tidak” sebanyak 23,9%.

5. Memilih karena tekanan

Tabel 13: Persentase Memilih Karena Tekanan

No.	Kelurahan	Ya	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	36	26,9%
2	Padang Sarai	39	29,1%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 13 di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih karena tekanan untuk

Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “ya” sebanyak 26,9% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “ya” sebanyak 29,1%.

Hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat, menurut Pak Badu (nama samaran) bahwa “Dalam pemikirannya kalau sudah dikasih uang atau hadiah itu sudah berbentuk tekanan, sehingga pada waktu pencoblosan kita ingat hadiah yang dikasihnya, ingat pasangan calonnya, ingat partainya.”

Jadi dari hasil kuesioner di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Padang bisa dikatakan masyarakat yang terkategori pemilih subjek.

Hasil angket partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih partisipan di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Padang Sarai sebagai berikut:

1. Memilih karena tidak diberi uang atau diiming-imingkan hadiah

Tabel 14: Persentase Memilih tidak Diberi Uang atau Diiming-imingkan Hadiah

No.	Kelurahan	Tidak	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	92	68,7%
2	Padang Sarai	89	66,4%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 14 di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih karena diberi uang atau diiming-imingkan hadiah untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “tidak” sebanyak 68,9% dan sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “tidak” sebanyak 66,4%.

2. Mengetahui visi dan misi pasangan calon

Tabel 15: Persentase Pemilih Mengetahui Visi dan Misi Pasangan Calon

No.	Kelurahan	Ya	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	92	68,7%
2	Padang Sarai	96	71,6%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 15 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat yang

mengetahui visi dan misi pasangan calon untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “ya” sebanyak 68,7% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “ya” sebanyak 71,6%.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Siti (nama samaran) salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

Ia memilih pada Pilkada Kota Padang tahun 2013 dengan melihat visi, misi dan program unggulan dari pasangan calon yang dipilihnya. Ia memilih Mahyeldi-Enzalmi karena melihat program kerjanya yaitu gratis pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK negeri serta memberikan beasiswa berprestasi dari keluarga miskin. Jadi orang tua tidak terbebani lagi dengan biaya pendidikan yang mahal.

3. Terlibat dalam diskusi politik yang diadakan oleh pasangan calon

Tabel 16: Persentase Pemilih Terlibat dalam Diskusi Politik yang Diadakan oleh Pasangan Calon

No.	Kelurahan	Ya	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	44	32,8%
2	Padang Sarai	40	29,9%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 16 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam diskusi politik yang diadakan oleh pasangan calon untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “ya” sebanyak 32,8% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “ya” sebanyak 29,9%.

4. Mengenal pasangan calon yang dipilih

Tabel 17: Persentase Pemilih Mengenal Pasangan Calon yang Dipilih

No.	Kelurahan	Ya	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	98	73,1%
2	Padang Sarai	102	76,1%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 17 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat yang mengenal pasangan calon yang dipilih untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “ya” sebanyak 73,1% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “ya” sebanyak 76,1%.

5. Memilih karena tekanan

Tabel 18: Persentase Pemilih Memilih tidak Karena Tekanan

No.	Kelurahan	Tidak	
		Frekuensi	(%)
1	Pasie Nan Tigo	88	65,7%
2	Padang Sarai	95	70,9%

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner

Data pada Tabel 18 di atas, menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih karena tekanan untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo yang menyatakan “tidak” sebanyak 65,7% sedangkan untuk Kelurahan Padang Sarai yang menyatakan “tidak” sebanyak 70,9%.

Jadi dari hasil kuesioner di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Padang sudah terkategori pemilih partisipan.

Partisipasi politik sebagai suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada faktor dari dalam diri seseorang, faktor dari luar dan ada yang menggabungkannya. Variabel yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat: Pertama, aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesediaan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kedua, menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Begitu juga dengan analisis karakteristik responden bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Padang Sarai adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan seseorang serta pengetahuan politik seseorang.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih subjek dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013 adalah: a) Untuk di Kelurahan Pasie Nan Tigo, masyarakat yang memilih karena diiming-imingkan hadiah yang menyatakan “ya” sebanyak 31,3%, mengetahui visi dan misi pasangan calon yang menyatakan “tidak” sebanyak 31,3%, terlibat dalam diskusi politik menyatakan “tidak” sebanyak 67,2%, mengenal pasangan calon yang dipilih menyatakan “tidak” sebanyak 26,9%, memilih sesuai hati nurani menyatakan “tidak” sebanyak 6,7%, memilih karena tekanan yang menyatakan “ya” sebanyak 26,9%. b) Untuk Kelurahan Padang Sarai, masyarakat yang memilih karena diiming-imingkan hadiah yang menyatakan “ya” sebanyak 33,6%, mengetahui visi dan misi pasangan calon yang menyatakan “tidak” sebanyak 28,4%, terlibat dalam diskusi politik yang menyatakan “tidak” sebanyak 70,1%, mengenal pasangan calon yang dipilih menyatakan “tidak” sebanyak 23,9%, memilih sesuai hati nurani yang menyatakan “tidak” sebanyak 9,7%, memilih karena tekanan yang menyatakan “ya” sebanyak 29,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Padang Sarai dapat terkategori pemilih subjek.
2. Tingkat partisipasi politik masyarakat yang terkategori pemilih partisipan dalam pemilihan kepala daerah Kota Padang tahun 2013 adalah: a) Untuk Kelurahan Pasie Nan Tigo masyarakat yang memilih tidak karena uang atau iming-iming hadiah sebanyak 68,7%, memilih karena mengetahui visi dan misi dari pasangan calon sebanyak 68,7%, memilih karena terlibat

dalam diskusi politik sebanyak 32,8%, memilih karena mengenal pasangan calon sebanyak 73,1%, memilih sesuai dengan hati nurani se banyak 93,3% dan memilih karena tidak ada tekanan sebanyak 65,7%. b) Untuk Kelurahan Padang Sarai masyarakat yang memilih tidak karena uang atau iming-iming hadiah sebanyak 66,4%, memilih karena mengetahui visi dan misi dari pasangan calon sebanyak 71,6%, memilih karena terlibat dalam diskusi politik sebanyak 29,9%, memilih karena mengenal pasangan calon sebanyak 76,1%, memilih sesuai dengan hati nurani sebanyak 90,3% dan memilih karena tidak ada tekanan sebanyak 70,9%. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kelurahan Pasie Nan Tigo dan Kelurahan Padang Sarai banyak terkategori pemilih partisipan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat masuk kategori pemilih subjek dan pemilih partisipan dalam pemilihan kepala

daerah Kota Padang tahun 2013 adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan seseorang serta pengetahuan politik seseorang.

V. DAFTAR PUUSTAKA

- Adnan, Fachri. 2012. *Perilaku Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Padang: UNP Press Padang.
- Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1990. *Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- BPS. 2013. *Padang dalam Angka 2013*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2013. *Statistik Daerah Kecamatan Kota Tengah 2013*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2013. *Koto Tengah dalam Angka 2013*. Padang: Badan Pusat Statistik.
- Budiardjo, Miriam. 2002. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gaffar, Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Huntington, Samuel P. Joan, Nelson. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maran, Raga Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mas'ood, Mohtar dan MacAndrews. 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Miaz, Yalvema. 2012. *Partisipasi Politik, Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press Padang.
- Nursi, M. 2008. *Ilmu Politik*. Padang: Bung Hatta University Press.
- Panjaitan, Merphin. 2013. *Logika Demokrasi Menyongsong Pemilihan Umum 2014*. Jakarta: Permata Aksara.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabet.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.